

Peran BumDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Bagian Barat dan Utara Kabupaten Sumba Timur

Noti Babang¹, Mesakh Landu Praing², Gerald Antonio Hendrian Kahumbu³, Dirga Noveria Edelweiss Lobo⁴, Yuvensius Ramompas⁵, Yuniarti Reny Renggo⁶

^{1,3}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Studi Manajemen

^{3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Ekonomi Pembangunan

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 14, 2025

Revised May 25, 2025

Accepted Jun 3, 2025

Keywords:

BumDes
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Sumba Timur

ABSTRACT

This research aims to explore the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in empowering the village economy in the western and northern regions of East Sumba Regency. The study employs a qualitative descriptive approach to analyze how BUMDes carry out their functions through various business units, including poultry farming, agriculture, savings and loan services, clean water provision, tourism, and rental services. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and literature review. The results show that these BUMDes have made significant contributions to increasing local income, creating job opportunities, and reducing dependency on external markets. Socially, BUMDes also fosters community participation and solidarity by involving youth and women in the economic process. However, several challenges were identified, including low public awareness, lack of competent human resources, weak organizational structure, and limited infrastructure. Strengthening BUMDes requires continuous capacity building, better institutional governance, and improved infrastructure to support sustainable village development.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Noti Babang,
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Studi Manajemen, Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia
Jl. R. Suprpto No. 35, Prailiu, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur,
Indonesia.
Email: arshyrambunotibabang19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Desa merupakan pondasi utama dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha yang menguntungkan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri (Darwita dan Redana, 2018; Ramompas *et al.*, 2024). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu inisiatif pemerintah Desa yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mempercepat dan mendukung proses Pembangunan Desa. Program ini mencakup berbagai sektor seperti pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi, teknologi dan pendidikan (Wahyuni *et al.*, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumba Timur, terdapat sebanyak 140 BUMDes yang telah didirikan dan mulai beroperasi dari tahun 2017 hingga 2019. Seluruh BUMDes tersebut dikelola oleh pemerintah Desa dan bekerja sama dengan pengurus BUMDes yang telah ditetapkan melalui forum musyawarah bersama masyarakat, sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi dan kemandirian Desa. BUMDes yang telah terbentuk kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu BUMDes aktif dan BUMDes tidak aktif.

Menurut Pratama (2019) dan Saifullah (2023) suatu BUMDes dinyatakan aktif apabila memenuhi lima indikator utama, yakni 1) kriteria kelembagaan, yang meliputi legalitas hukum, struktur organisasi dan tata kerja. 2) kriteria keuangan, yang meliputi modal, pendapatan, pengeluaran, laba/rugi. 3) kriteria operasional, yang meliputi produk/jasa yang dihasilkan, pelanggan, pemasaran dan distribusi. 4) kriteria kemandirian, yang meliputi kemampuan dalam menghasilkan keuntungan, kemampuan dalam memenuhi modal sendiri dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sebanyak 93 BUMDes yang memenuhi seluruh kriteria dan hal ini dikatakan sebagai BUMDes yang aktif. Sementara itu, 47 BUMDes lainnya masih tergolong tidak aktif dikarenakan belum memenuhi satu atau lebih dari indikator yang telah ditetapkan dan disebabkan oleh beberapa kendala yang ada di setiap masing-masing BUMDes. Dalam pasal 1 peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan dibangun bersama desa-desa guna mengelola usaha, pemanfaatan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa. Tujuan utama dari pendirian BUMDes ini adalah untuk mengelola berbagai potensi Desa, baik berupa aset, layanan, maupun kegiatan usaha lainnya, demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Desa secara berkelanjutan.

Menurut Marfilia *et al.*, (2025) pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk membangun serta mengembangkan kapasitas suatu kelompok atau komunitas melalui peningkatan keterampilan, pembentukan pola pikir, dan mendorong munculnya tindakan-tindakan yang bersifat mandiri dan berkelanjutan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan tahapan berupa penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hailudin (2021) dan Firdaus (2020) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peranan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kondisi perekonomian melalui berbagai jenis usaha yang dijalankan. Sementara itu, menurut Majdi *et al.*, (2020), Salihin (2021), Wahyuni *et al.*, (2022), serta Puspaningrum dan Kurniawati (2019) peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai belum optimal, karena masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh masing-masing BUMDes.

Menurut Harahap dan Basri (2025) Untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditopang oleh tiga faktor yang akan mengangkat dan menjadikan organisasi dapat mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberlanjutan BUMDes yaitu: 1) Sumber daya manusia menjadi pelaku atau yang menggerakkan unit usaha. 2) Keterlibatan Masyarakat merupakan faktor eksternal yang akan membantu keberhasilan organisasi. 3) faktor Kepala Desa sebagai pemimpin di wilayah Desa, semakin bagus pengaruh yang pemimpin lakukan akan terasa berdampak terhadap eksistensi organisasi dalam mewujudkan keberhasilan BUMDes

BUMDes berperan sebagai perangkat ekonomi Desa yang memiliki fungsi mengelola aset Desa, menghasilkan pendapatan bagi Desa, dan menyediakan layanan ekonomi untuk masyarakat Desa (Widodo H, 2024). BUMDes tersebut berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mengelola usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perdagangan, transportasi, bahkan pariwisata yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di Desa (Nisaa dan Hidayati, 2022).

Penelitian tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yakni antara lain yang dilakukan oleh Savira A (2025), Dwiyantri (2022), Firdaus R (2022), dan Marfilia *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa peran BUMDes sangat berpengaruh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai usaha yang dijalankan. Sementara penelitian oleh

Wahyuni *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa peran BUMDes sudah cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya saja belum dikatakan maksimal dikarenakan masih banyak kendala yaitu kurangnya modal yang dimiliki, keterbatasan SDM dalam pengelolaan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara peran, tantangan, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Peran BUMDes salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di bagian Barat dan Utara Kabupaten Sumba Timur melalui usaha yang dijalankan. Namun dalam menjalankan perannya terdapat beberapa tantangan yang terjadi di masing-masing Desa dari unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh dan disampaikan dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata dan bahasa, sesuai dengan permasalahan yang terjadi (Ramompas dan Panggabean, 2024). Populasi dalam penelitian ini yaitu 93 BUMDes aktif dan sampel sebanyak 5 BUMDes dengan jumlah responden sebanyak 63 orang. Penelitian ini dilakukan pada lima Desa yakni; Desa Mondu, Hambapraing, Kuta, (Kecamatan Kanatang); Desa Pambotanjara (Kecamatan Kota Waingapu); dan Desa Kambuhapang (Kecamatan Lewa). Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Juni 2025.

Jenis pengambilan data menggunakan data primer dan sekunder, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yaitu *purposive sampling* dengan proses pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi, studi literatur dan laporan. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala Desa, Pengurus BUMDes (Direktur, sekretaris, bendahara, dan pengawas), Anggota BUMDes dan Masyarakat. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (Septianti *et al.*, 2025). Tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif yaitu; Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*) (Farida dan Khasanah, 2024; Renggo dan Rewa, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Usaha BUMDes

a) Ayam Petelur

Usaha ayam petelur dijalankan oleh BUMDes Hamu Eti di Desa Mondu dengan modal awal Rp 220.000.000. unit usaha ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama karena permintaan telur di masyarakat cukup tinggi. sistem kerja peternakan ini dikelola oleh

masyarakat Desa, dengan dua orang tenaga kerja tetap yang dipekerjakan oleh BUMDes. sistem pembayaran yang digunakan bersifat fleksibel, dimana masyarakat dapat membeli telur dan membayar setelah masa panen atau saat memiliki uang. Hal ini sangat membantu petani dan warga desa dalam memenuhi kebutuhan protein hewan dengan cara yang lebih terjangkau.

b) Usaha Pertanian

Usaha pertanian masih menjadi unit usaha yang penting di Desa Mondu, terutama dalam menyediakan benih, pupuk, bahan pangan seperti tomat, labu, buah naga, jagung, sayur-sayuran dengan sistem pembayaran pasca panen. Produk hasil pertanian ini dijual kepada warga sekitar dengan harga yang terjangkau. Usaha pertanian ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga desa yang belum memiliki pekerjaan tetap.

c) Usaha Penyewaan Tenda dan Kursi

BUMDes Hamu Eti yang berada di Desa Mondu juga memiliki unit usaha penyewaan tenda dan kursi. Usaha ini bermula dari observasi kegiatan masyarakat yang sering menyewa peralatan dari luar desa untuk acara pernikahan, adat atau acara lainnya. Dengan adanya usaha tersebut, masyarakat dapat menyewa secara lokal dengan harga lebih murah dan layanan yang cepat. Usaha ini dikelola langsung oleh pengurus BUMDes dan menjadi alternatif usaha yang cepat menghasilkan. Penyewaan ini dilakukan secara fleksibel, dan masyarakat juga diberi kemudahan dalam pembayaran. Meskipun bukan unit utama, usaha ini sangat membantu penguatan kas BUMDes dan memperkuat hubungan antara BUMDes dan masyarakat.

d) Usaha Jual Beli Beras

Di Desa Hambapraing, BUMDes Kawara Hamu sebelumnya menjalankan usaha jual beli beras sebagai unit usaha awal dengan modal Rp300.000.000. Usaha ini sangat membantu masyarakat karena mereka tidak lagi perlu pergi ke kota untuk membeli beras. Selain menghemat biaya transportasi dan BBM, masyarakat juga mendapatkan beras dengan harga yang kompetitif. Namun, karena fluktuasi harga beras yang naik secara signifikan, unit usaha ini sempat dihentikan sementara. Ke depan, BUMDes berencana untuk menghidupkan kembali usaha ini dengan sistem manajemen dan permodalan yang lebih matang.

e) Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu unit usaha yang umum ditemukan, seperti di BUMDes *Palonda Lima Kuta* (Desa Kuta) dan *Takawara Hadangu* (Desa Kambuhapang). Di Desa Kuta, usaha ini mulai dirintis pada tahun 2022 dengan modal awal Rp 108.000.000. Usaha simpan pinjam digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro dan warga yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Sementara di Desa Kambuhapang, usaha simpan pinjam dimulai dengan modal awal sebesar Rp25.000.000 diperoleh dari dana Desa, yang kemudian ditambah bantuan dari kementerian hingga mencapai Rp175.000.000. Usaha ini sangat membantu warga dalam situasi darurat atau saat kesulitan keuangan. Namun, pengelolaan keuangan perlu diperkuat karena masih ditemukan kendala dalam pengembalian pinjaman.

f) Usaha Air Bersih

Unit usaha air bersih dijalankan oleh BUMDes *Palonda Lima Kuta* Desa Kuta. Masalah kekurangan air bersih di Desa Kuta mendorong BUMDes untuk membentuk unit usaha ini pada tahun 2022. Usaha ini menyediakan air bersih bagi warga melalui sistem iuran atau pembayaran berkala. Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok, sehingga usaha ini menjadi sangat relevan dan strategis. BUMDes membangun jaringan distribusi air dari mata air desa ke pemukiman warga. Air bersih yang kemudian disalurkan menggunakan tandon ke rumah-rumah yang sebelumnya bergantung pada sumber air jauh. Manfaat langsung dari usaha air bersih yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan penghematan biaya pembelian air.

g) Usaha pariwisata

Salah satu unit usaha yang berkembang pesat adalah sektor pariwisata, seperti di Desa Pambotanjara. Di Pambotanjara, BUMDes *Harapan Baru* mengelola Bukit Wairinding yang terkenal secara nasional dengan modal awal sebesar Rp50.000.000. Unit usaha ini tidak hanya menarik pengunjung lokal dan luar daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya usaha turunan seperti penjualan keripik pisang, kain tenun, dan obat herbal. Wisata ini menjadi andalan desa dalam menciptakan lapangan kerja bagi pemuda, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat identitas budaya lokal.

h) Usaha Rental Mobil

BUMDes *Takawara Hadangu* di Desa Kambuhapang mengelola usaha rental mobil. Usaha ini dimulai dengan modal awal sebesar Rp 175.000.000. Usaha ini menjadi alternatif sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. Masyarakat dapat menyewa mobil untuk berbagai keperluan, seperti transportasi ke kota, kegiatan keagamaan, atau distribusi hasil pertanian. Sistem penyewaan dikelola langsung oleh pengurus dan digunakan secara bergilir. Selain memberikan pemasukan bagi BUMDes, usaha ini juga mempermudah akses transportasi masyarakat desa yang selama ini kesulitan kendaraan.

Peran BUMDes

a) Peran Secara Ekonomi

Secara ekonomi, BUMDes berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Desa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Melalui berbagai unit usaha seperti peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, usaha simpan pinjam, penyediaan air bersih, pariwisata serta penyewaan tenda dan kendaraan rental mobil, BUMDes memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Usaha-usaha ini juga membuka lapangan kerja bagi warga desa, terutama bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, keberadaan BUMDes membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi mandiri di tingkat desa. Beberapa BUMDes bahkan menerapkan sistem pembayaran fleksibel yang sangat membantu masyarakat, seperti pembayaran pasca panen dalam unit peternakan dan pertanian.

b) Peran Secara Sosial

Secara sosial, BUMDes juga memainkan peran yang sangat penting sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan struktur sosial desa. Lebih dari sekadar lembaga usaha, BUMDes menjadi ruang inklusif bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kegiatan BUMDes mendorong masyarakat untuk bergotong royong, membangun rasa memiliki terhadap aset desa, serta memperkuat solidaritas sosial. Beberapa BUMDes melibatkan kelompok perempuan dan pemuda dalam pengelolaan unit usaha, seperti pengolahan produk lokal dan pengelolaan wisata, sehingga memperluas ruang partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan BUMDes turut membentuk budaya tata kelola yang sehat, jujur, dan terbuka. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial di desa.

Tantangan BUMDes

a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Tantangan utama yang dihadapi BUMDes adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan BUMDes sebagai milik bersama. Dimana masih banyak masyarakat yang menganggap fasilitas dan layanan BUMDes adalah bentuk bantuan pemerintah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, sehingga tidak merasa memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman atau berkontribusi secara aktif. Hal ini tampak jelas, misalnya di Desa Kambuhapang, di mana banyak warga menunggak pembayaran

pinjaman dari unit usaha simpan pinjam, yang berdampak langsung pada stagnasi perputaran dana. Rendahnya partisipasi ini juga terlihat dalam minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa atau pengembangan usaha, sehingga inisiatif dan inovasi seringkali hanya bersumber dari pengurus inti BUMDes saja. Hal ini dilihat dari paparkan oleh Bapak Kepala Desa Mondu, dengan menanggapi pertanyaan *“Bagaimana cara pemerintah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi bumdes?”* beliau menjawab *“Masyarakat ini tidak paham mereka berpikir bahwa barang yang dijual dari bumdes itu bantuan bentuk dari pemerintah padahal itu untuk membantu masyarakat untuk tidak belanja keluar desa sehingga banyak juga masyarakat yang tidak membayar”*

b) Kurangnya SDM

BUMDes menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan SDM yang kompeten. Banyak pengurus BUMDes, terutama di desa-desa seperti Mondu dan Kambuhapang, masih memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan manajerial, keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun beberapa pelatihan telah diselenggarakan oleh lembaga pendamping seperti perguruan tinggi dan LSM, implementasi hasil pelatihan masih terbatas karena minimnya pendampingan lanjutan. Di beberapa kasus, pengurus harus belajar secara mandiri mengelola pembukuan, laporan kegiatan, hingga pemasaran digital. Keterbatasan ini membuat pengelolaan usaha BUMDes berjalan kurang optimal, lambat berkembang, dan rentan terhadap kesalahan teknis maupun administratif. Selain itu juga minimnya pengetahuan pengurus BUMDes terkait pinjaman yang mereka berikan. Dimana sebagian pengurus memberikan pinjaman kepada orang yang bukan warga di Desa Tersebut. Sebagaimana hal ini dilihat dari percakapan kami dengan Bapak Desa Kambuhapang.

informan: ada kesalahan dari pengurus bumdes yang lama, yang peminjam ini, ada beberapa yang bukan masyarakat desa kambuhapang.

Peneliti: kenapa bisa begitu bapak?

informan: iyaa karena ada kedekatan di dalam. Pinjam juga adalah sampai belasan juta. Yang lalu sempat ada masyarakat kita tanya kenapa tidak kasih kembali uang bumdes? dia bilang “ee bagaimana, yang pinjam belasan juta saja tidak kasih kembali, masa saya yang hanya pinjam satu dua saja mau dituntut” kan ha- hal seperti itu yang sulit.

Dari percakapan ini menunjukkan bahwa pengurus sebelumnya tidak menerapkan prinsip seleksi yang ketat dan profesional dalam pengelolaan dana BUMDes. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, yang memicu rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pengembalian pinjaman.

c) Lemahnya Struktur Organisasi BumDes

Di beberapa desa, struktur organisasi BUMDes belum terbentuk secara profesional dan fungsional. Tugas dan wewenang antara pengurus seringkali tidak teratur, bahkan ada pengurus yang memegang lebih dari satu peran karena keterbatasan personal. Di Desa Kuta, misalnya, terdapat ketidakseimbangan hubungan antara pemerintah desa dan BUMDes, dimana pemerintah desa terlalu mendominasi pengambilan keputusan, tidak memberikan kebebasan kepada pengurus BUMDes untuk mengembangkan usaha yang dikelola bahkan sampai mengambil alih unit usaha rental mobil selain itu juga sebagian uang iuran yang seharusnya dibayar ke bendahara namun sebagiannya dipegang oleh kepala Desa. Hal ini membuat pengurus BUMDes merasa tidak nyaman. Situasi ini mengindikasikan belum jelasnya garis koordinasi dan kemandirian kelembagaan BUMDes. Lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya mekanisme evaluasi internal juga menjadi faktor

yang menghambat pertumbuhan kelembagaan secara sehat dan berkelanjutan. Seperti paparan yang telah dijelaskan oleh Bapak Markus Latar selaku direktur BUMDes di Desa Kuta dengan menanggapi pertanyaan apa saja tantangan terbesar selama menjadi direktur BUMDes?

“tantangan itu tadi, yang paling besar tu tidak ada kebebasan dari pemerintah, karena kami ini banyak pengetahuan yang didapat waktu pelatihan, kami tidak bisa berkembang karena semuanya diatur...kami kerja ini salah, kami kerja itu salah, kami tidak bisa proaktif begitu istilahnya, kami mau ikut kami punya rencana sesuai yang kami dapat waktu pelatihan itu tidak bisa. Itu tantangan memang yang paling utama itu disitu sudah. Kemudian terkait tidak lancarnya pembayaran ini, kalau ada dukungan dari pemerintah sebenarnya, kan mereka yang punya masyarakat ini, kami tidak bisa keras dengan dengan masyarakat, bukan kami punya masyarakat. Lalu terkait struktur, sebetulnya pemerintah desa itu, dia harusnya teken mati di belakang kami itu kalau sesuai yang kami lapor terkait pengembalian masyarakat, dia punya masyarakat, lalu dia masuk dalam struktur, ya itu tantangan nya kami tidak bisa buat apa-apa.

d) Minimnya Infrastruktur BUMDes

Permasalahan minimnya Infrastruktur juga menjadi tantangan nyata dalam pengelolaan BUMDes di beberapa Desa, seperti yang terjadi di Desa Mondu dan Desa Pambotanjara. Di Desa Mondu keterbatasan infrastruktur dilihat dari minimnya ketersediaan sarana produksi, seperti rak telur dan kurangnya transportasi operasional. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan usaha, terutama dalam proses penyimpanan dan pendistribusian barang ke konsumen. Hal ini dilihat paparan dari direktur BUMDes Desa Mondu yang mengatakan

“kita kendala di rak telur, telur banyak tapi rak tidak ada. kemarin-kemarin kami sewa oto, tapi karena biaya sewa mahal, kami pakai motor saja untuk antar”.

Sedangkan yang dihadapi oleh Desa Pambotanjara terkait sektor pariwisata adalah kurangnya Infrastruktur seperti area lahan parkir yang sempit bagi wisatawan yang berkunjung. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk datang kembali. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara direktur BUMDes saat menanggapi pertanyaan “selama menjalani usaha ini, apa saja kendala yang dialami”?

“kendalanya kami itu lahan parkir yang sempit, setengah mati kami arahkan mobil pengunjung. Trus yang menjadi kendalanya lagi itu dari warga, kalau warga sudah tidak terima dari apa yang disampaikan oleh pengurus bumdes tentang parkir, itu kalau mereka parkir sebentar sembarangan sudah, nah itu yang menjadi kendalanya”.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang di lima Desa di wilayah Barat dan Utara Kabupaten Sumba Timur, dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa. Berbagai bentuk unit usaha yang dijalankan seperti peternakan ayam petelur, usaha pertanian, simpan pinjam, jual beli beras, usaha pariwisata, hingga jasa penyewaan menunjukkan bahwa BUMDes mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Keberadaan BUMDes turut membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa secara mandiri. Selain perannya di bidang ekonomi, BUMDes juga berperan secara sosial sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui keterlibatan pemuda, perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dalam kegiatan usaha dan pengambilan keputusan. BUMDes juga membentuk gotong royong,

meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Desa. Namun dalam pelaksanaannya, BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya struktur organisasi serta minimnya infrastruktur BUMDes. Maka perlu adanya Peningkatan Kapasitas SDM yang berkelanjutan bagi pengurus BUMDes, meningkatkan Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung keberlangsungan BUMDes, penataan ulang struktur organisasi BUMDes agar lebih efisien, fungsional dan akuntabel, serta pengembangan infrastruktur demi mendukung keberlanjutan usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Panji Sakti*, 9(1): 51–60.
- Farida, N., & Khasanah, U. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Gresik. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 9(1): 40–44.
- Firdaus, Raudhatul. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7): 1387–1394.
- Hailudin, Hailudin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1): 1–9. doi:10.29303/e-jep.v3i1.32.
- Harahap, Agus Salim., & Tengku Hasan Basri. (2025). Faktor Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memajukan Organisasi (Studi Literatur). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1): 5133–5140.
- Majdi, Muhammad Zainul., Susilawati Susilawati., Farhana Muhammad., & Nurhastuti. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(2): 236–242. doi:10.29408/jpek.v4i2.2827.
- Marfilia, Alda., Yulistia Devi., Eka Nova Astuti., Tsabitah Aliyah., & Iqbal Wahyudin. (2025). Peran BUMDes Swadesa Arta Mandiri Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa Wonomerto Kabupaten Lampung Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1): 219–230.
- Nisaa, Khoiron., & Nurul Hidayati. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari. *Jurnal Sosial Sains*, 2(7), 779–786. doi:10.36418/sosains.v1i7.444.
- Pratama, R. (2019). Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Klasifikasi Tingkat Perkembangan Bumdes Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Sustainability (Switzerland)*, 1–9. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Puspaningrum, Irma Irawati., & Dina Kurniawati. (2019). Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal ABDI RAJA*, 2(2): 24–29. doi:10.24929/adr.v2i2.754.
- Rahmadhona, Lawdy., & Saifullah. (2023). Pengukuran Kinerja Bumdes Menurut Aspek Permodalan, Likuiditas, Kemandirian Dan Pertumbuhan. *JEMB: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 157–170.
- Ramompas, Y., Horung, N., Pari, P.Y.P., Missa, J.C., Ndima, A.E., Rija, I.R., Ndakularak, E., Nggadung, M.H.I., Nggadung, J.A., Sahoe, D.S., Hubang, N., & Landupraing, E. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Unkriswina Sumba Dibidang UMKM, Pangan Lokal, Pertanian, dan Pendidikan di Desa Mata Lombu. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 79-91. doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.554.

- Ramompas, Y., & Meiran Panggabean. (2024). Peran Pemulung Dalam Tata Kelola Sampah Studi Kasus Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomika*, 15(02): 219–230. doi:10.35334/jek.v15i02.5435.
- Renggo, Y. R., & Rewa, K. A. (2023). Kontribusi Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomika*, 14(02): 189–210.
- Salihin, Agus. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1): 96–104. doi:10.29300/aij.v7i1.3937.
- Septianti, Y. Intan., & Rizqi, R. Muhammad. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(5), 300–318.
- Wahyuni., Wirawan Suhaedi., & Isnawati Isnawati. (2022). Analisis Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 698–705. doi:10.29303/risma.v2i4.330.
- Widodo, H. T., & Hartanto, B. (2024). Pengembangan Usaha Oleh Badan Usaha Milik Desa Warga kerja (Studi Di Desa Warga kerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 210-218.